

ABSTRAK

Mohamad Faisal Aulia, “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kupang NTT (Studi Putusan No. 89/Pdt.G/2021/PA.Kp)

Putusan pengadilan agama kupang Nusa Tenggara Timur pada perkara nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Kp tentang pembagian harta bersama tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bertolak belakang dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan pada Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang harta bersama; dasar hukum pertimbangan hakim; dan menganalisis metode ijtihad hakim di Pengadilan Agama Kupang NTT pada putusan nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Kp)

Hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam yang juga merupakan dasar hukum dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama khususnya pada perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kupang.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa pertimbangan hukum tentang pembagian harta bersama Di Pengadilan Agama Kupang NTT (Studi Putusan No. 89/Pdt.G/2021/PA.Kp)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Kp, tidak memandang dari segi yuridis atau tidak menggunakan ketentuan hukum positif khususnya yang telah diatur dalam KHI Pasal 97 mengenai porsi pembagian harta bersama, melainkan berusaha menggali nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Maka dari itu adil apabila pembagian harta bersama adalah Penggugat mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat sebanyak 2/3 bagian dari harta Bersama; Dasar hukum pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Kp tentang pembagian harta pasca perceraian di Pengadilan Agama Kupang NTT Berupa Penjatuhan dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta adalah Pasal 191 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)*, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil; Ijtihad yang diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara putusan Pengadilan Agama Kupang NTT Pada perkara nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Kp adalah ijtihad yang mengintegrasikan antara ijtihad intiqah'I dan ijtihad insya'I. dimana majelis hakim tidak membagi sama banyak di antara kedua belah pihak yang bersengketa melainkan dilakukan pembagian secara proporsional, karena hakim melakukan penemuan hukum dan penafsiran hukum dalam menemukan hukumnya.

ABSTRACT

Mohamad Faisal Aulia, "Analysis of Judges' Considerations on the Distribution of Shared Property in the Kupang Religious Court NTT (Study of Decision No. 89/Pdt.G/2021/PA. Kp)

The decision of the Kupang religious court of East Nusa Tenggara in case number 89/Pdt.G/2021/PA. The KP on the division of common property does not refer to laws and regulations and is contrary to article 97 of the Compilation of Islamic Law.

The purpose of this study is to analyze the judge's consideration of common property; legal basis for judge's consideration; and analyzed the ijthid method of judges at the Kupang Religious Court NTT in decision number 89/Pdt.G/2021/PA. Kp)

Judges in deciding a case in Court must refer to the applicable legislation, in this case the Compilation of Islamic Law which is also the legal basis in deciding cases in Religious Courts, especially in cases of division of joint property in Kupang Religious Court.

The type of research that researchers use is library research with a normative juridical approach by analyzing legal considerations regarding the division of joint property at the Kupang Religious Court NTT (Study of Decision No. 89/Pdt.G/2021/PA. Kp)

The results showed that; The judge's consideration in the division of joint property in Decision number 89/Pdt.G/2021/PA. Kp, does not look at it from a juridical point of view or does not use positive legal provisions, especially those stipulated in Article 97 of the KHI regarding the portion of the division of joint property, but tries to explore the values of justice in accordance with existing legal facts. Therefore, it is fair if the division of joint property is that the Plaintiff gets 1/3 (one-third) share and the Defendant 2/3 part of the joint property; The legal basis for the judge's consideration in sentencing the decision in case number 89/Pdt.G/2021/PA. The Kp regarding the division of property after divorce in the Kupang Religious Court NTT in the form of a judgment is carried out first or a judgment immediately is Article 191 paragraph (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, Article 54 and Article 57 *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)*, and SEMA No. 3 of 2000 concerning Judgment and Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) and Provisionil, and SEMA No. 4 of 2001 concerning Issues of Judgment and Merta and Provisionil; Ijthid applied by the panel of judges in the case of the decision of the Kupang Religious Court NTT in case number 89/Pdt.G/2021/PA. Kp is ijthid that integrates between *intiqal* ijthid and *insya'I* ijthid. Where the panel of judges does not divide equally between the two parties to the dispute but a proportional division is carried out, because the judge conducts legal discovery and legal interpretation in finding the law.